

TRANSFORMASI DIGITAL DI PEDESAAN: PERAN BUMDES DALAM PENGUATAN AKSES INTERNET WARGA DESA KROCOK KABUPATEN BLORA

Aras¹⁾, Kuncoro Bayu Prasetyo²⁾

¹⁻² Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Semarang
Email: arasbayan007@students.unnes.ac.id; mrbayu@mail.unnes.ac.id

Artikel histori:

Submit: 22-05-2025
Revisi: 29-05-2025
Diterima: 30-05-2025
Terbit: 23-06-2025

Kata Kunci:

digital transformation,
BUMDes, community
internet access

Korespondensi:

Arasbayan007@students.
unnes.ac.id

Abstrak: *This study aims to explore digital transformation in rural areas through the provision of village WiFi network services in Krocok Village, Japah District, Blora Regency, which is managed by the Kerjaya Krasa Village-Owned Enterprise. The main problem studied is how digital transformation takes place and its impact on the socio-economic life of the community. This study uses a qualitative method with a naturalistic approach. Data were collected through semi-structured interviews, direct observation, and documentation of the activities of providing and utilizing village internet services. The results of the study show that village WiFi services contribute to increasing access to information, citizen productivity, and Village Original Income. The conclusion of this study states that digital transformation through village WiFi management is a strategic means of strengthening digital development and improving the welfare of rural communities. This study also found a number of challenges, such as limited network infrastructure in certain areas and the existence of community groups that do not fully understand digital technology.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi strategi penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, terutama dalam era transformasi digital. Sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa, BUMDes memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal serta pengembangan infrastruktur digital (Peran & Desa, 2025). Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada desa

untuk membentuk dan mengelola BUMDes secara mandiri dengan semangat gotong royong. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperkuat kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan otonom pada tingkat paling dasar. Desa memperoleh kewenangan untuk menyusun dan menyelenggarakan pemerintahan serta melaksanakan pembangunan secara mandiri guna mempercepat peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Sholahudin dkk, 2017). Relevansi penguatan ini semakin meningkat seiring kemajuan teknologi informasi yang menuntut adaptasi desa terhadap arus transformasi digital, terutama dalam aspek pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan sistem informasi kelembagaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, akses internet telah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Pemerintah melalui berbagai kebijakan terus mendorong digitalisasi di desa guna meningkatkan konektivitas dan memperluas akses informasi. Hadirnya program WiFi desa menjadi bukti bahwa transformasi digital telah mulai merambah wilayah pedesaan, didorong oleh kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang lebih luas. Reformasi tahun 1998 menjadi awal mula berkembangnya inisiatif BUMDes, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa, termasuk dalam sektor digital (Ridwansyah dkk, 2021). Selain itu, kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan desa dana hibah yang cukup besar dari pemerintah pusat untuk mengoptimalkan pembangunan desa, termasuk dalam aspek infrastruktur digital. Transformasi digital yang diinisiasi oleh BUMDes diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti peningkatan literasi digital, efisiensi administrasi desa, serta pemberdayaan ekonomi berbasis internet (Arindhawati & Utami, 2020).

Namun, efektivitas program pengadaan jaringan internet desa masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun dana telah dialokasikan, implementasi program ini masih menemui hambatan, seperti rendahnya tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan jaringan, serta kendala teknis dalam pemeliharaan infrastruktur (Fkun, 2019). Salah satu permasalahan utama adalah bagaimana memastikan keberlanjutan operasional layanan internet desa agar tetap dapat diakses dengan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan strategi diversifikasi layanan, peningkatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi pengelolaan dana untuk mendukung kelangsungan program ini sesuai dengan regulasi pemerintah (Ginting & Nawawi, 2022).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengadaan jaringan internet desa yang dikelola oleh BUMDes “Kerjaya Krasa”. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital antara desa dan kota, sekaligus meningkatkan daya saing desa di era globalisasi. BUMDes memiliki potensi besar sebagai penggerak utama transformasi digital desa melalui penyediaan layanan internet yang dapat digunakan untuk pendidikan, usaha mikro, dan administrasi desa (Giawa dan Rukoyah, 2021). Pengelolaan jaringan

internet desa juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Desa Krocok, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, merupakan salah satu desa yang mulai menerapkan program digitalisasi melalui pengadaan WiFi desa yang dikelola oleh BUMDes Kerjaya Krasa. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses internet yang terjangkau bagi masyarakat, mendukung aktivitas pendidikan, memperkuat perekonomian berbasis digital, serta meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi desa. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, tantangan teknis dalam pemasangan jaringan, serta masalah keberlanjutan operasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang tepat, termasuk manajemen aset yang baik, transparansi keuangan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan layanan internet desa (Iswanto et al., 2024).

Transformasi digital di Desa Krocok menandai pergeseran penting dalam orientasi pembangunan desa, dari pendekatan konvensional menuju digitalisasi layanan dan penguatan kapasitas informasi masyarakat. BUMDes Kerjaya Krasa memainkan peran sentral dalam inisiatif ini, terutama sejak 2023, dengan menjadikan unit layanan internet desa sebagai salah satu sektor strategis. Pada tahap awal, infrastruktur jaringan internet sangat terbatas, hanya mencakup dua rumah dan enam titik warung penjual voucher WiFi. Namun, seiring reorganisasi kepengurusan, unit internet mulai diperluas dengan menggunakan teknologi nirkabel dan antena yang menjangkau lebih banyak titik layanan.

Kajian mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa program pengadaan WiFi desa ini mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Desa Krocok. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas program juga perlu dilakukan guna mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan internet desa. Kajian ini, diharapkan BUMDes Desa Krocok dapat menjadi contoh keberhasilan transformasi digital di pedesaan melalui pengelolaan jaringan internet yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti permasalahan dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Bhisma dkk (2025) meneliti kualitas laporan keuangan BUMDes Artha Krama Mandiri berdasarkan Kepmendes PDTT No. 136/2022 dan menemukan bahwa laporan keuangan belum memenuhi standar karena hanya mencakup neraca dan laba rugi, tanpa adanya laporan perubahan ekuitas, arus kas, maupun catatan atas laporan keuangan. Permasalahan utamanya adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi. Temuan serupa dijelaskan oleh Tenda dkk. (2021) yang menilai pengelolaan keuangan BUMDes Tounet dari aspek prinsip Good Corporate Governance, dan menemukan bahwa praktik akuntabilitas, transparansi, serta independensi belum berjalan optimal.

Padangan Sabiludin dkk (2023) saat mengkaji strategi peningkatan akuntabilitas keuangan di BUMDes Sidomapan melalui penerapan sistem informasi akuntansi. Mereka menekankan pentingnya regenerasi SDM dengan

mempertimbangkan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan etos kerja sebagai kunci keberhasilan. Peneliti Dewi & Putra Yasa (2025) menyoroti peran digitalisasi dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Tunjung Mekar, dan menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi dipengaruhi oleh sistem pendukung, SDM, dan prinsip organisasi. Hasil ini diperkuat oleh pandangan Ridwansyah dkk (2021), yang menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi desa sangat ditentukan oleh keaktifan pemerintah desa dan lembaga ekonomi lokal seperti BUMDes dalam menyediakan akses dan infrastruktur. Hal ini juga didukung oleh YUNIARDIKA (2022) yang menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya soal akses teknologi, tetapi juga perubahan budaya dan sistem kelembagaan di tingkat desa. Sementara itu, Irfan & Anirwan (2024) menyoroti bahwa kesinambungan digitalisasi di desa memerlukan dokumentasi, transparansi, serta koordinasi antar periode kepemimpinan, agar proses transformasi tidak terputus.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang signifikan karena mengangkat isu yang lebih fundamental dan kontekstual dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada aspek kinerja ekonomi atau evaluasi administratif BUMDes. Penelitian ini menyoroti secara mendalam peran, kendala, dan strategi transformasi kelembagaan BUMDes Kerjaya Krasa dalam konteks digitalisasi dan keberlanjutan tata kelola desa. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang banyak membahas optimalisasi unit usaha atau dampak BUMDes terhadap kesejahteraan semata, studi ini justru memfokuskan perhatian pada akar persoalan keberlanjutan organisasi, yaitu lemahnya sistem dokumentasi, minimnya proses serah terima kepengurusan, serta ketiadaan laporan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi penghambat serius dalam proses transformasi kelembagaan.

Nilai kebaruan lainnya terletak pada pendekatan analisis peran pemerintah desa dalam penguatan BUMDes Kerjaya Krasa tidak hanya sebagai fasilitator ekonomi, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam mendorong integrasi teknologi dan transparansi kelembagaan. Studi ini juga mencerminkan urgensi penguatan sistem pengarsipan dan pelaporan digital yang belum banyak dibahas secara kritis dalam penelitian terdahulu. Selain itu, dengan menempatkan layanan internet sebagai unit strategis dalam kerangka transformasi digital desa, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana BUMDes Kerjaya Krasa dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan berbasis teknologi dan bukan sekadar lembaga ekonomi lokal. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memperluas cakrawala keilmuan dalam studi tata kelola desa dan membuka ruang baru untuk formulasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Sebagaimana ditegaskan Saputra (2021), keberlanjutan kelembagaan BUMDes sangat bergantung pada ketersediaan dokumentasi dan kesinambungan antar kepengurusan. Pendapat ini selaras dengan penegasan lin Nida'ul Hasanah (2024) yang menekankan pentingnya tata kelola transisi dalam lembaga publik agar tidak terjadi stagnasi kebijakan. Selain itu, peneliti Ridwansyah dkk (2021) juga menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di desa sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah desa sebagai penggerak integrasi teknologi, bukan hanya sebagai fasilitator administratif. Ketiga pandangan ini

menjadi penguat teoritis terhadap temuan empiris dalam penelitian ini, sekaligus menunjukkan bahwa kebaruan studi ini terletak pada upaya mengintegrasikan tantangan struktural, teknologi, dan kelembagaan dalam satu kerangka analisis yang menyeluruh.

Permasalahan tersebut ditelaah melalui pendekatan studi kasus terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerjaya Krasa di Desa Krocok, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah desa dalam memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan BUMDes, khususnya dalam penguatan jaringan internet desa sebagai sarana operasional dan pelayanan ekonomi digital. Penelitian ini juga mengevaluasi pelaksanaan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada BUMDes Kerjaya Krasa, mengingat tidak ditemukan dokumen resmi maupun laporan keuangan pada masa transisi kepengurusan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana usaha BUMDes Kerjaya Krasa berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Krocok. Studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas peran kelembagaan desa dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis lokal serta transparansi tata kelola dana publik di tingkat desa, dan bagaimana kontribusinya tercermin dalam Pendapatan Asli Desa (PADes).

Meski dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan dana, rendahnya literasi digital warga, dan hambatan teknis, BUMDes mampu mengatasinya melalui kolaborasi dengan pihak ketiga dan optimalisasi anggaran desa. Menurut Wijaya (2020), BUMDes harus mendorong adopsi teknologi, bukan sekadar menyediakan akses. Huda dkk (2024) juga menekankan bahwa literasi digital merupakan prasyarat keberhasilan digitalisasi di desa. Keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan kemitraan teknis menjadi kunci utama. Hal ini selaras dengan pandangan Kusumawati (2024) bahwa pembangunan desa berbasis digital memerlukan peran aktif kelembagaan lokal dalam mendorong inovasi dan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Krocok, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini dipilih karena telah secara aktif mengembangkan layanan internet desa melalui pengelolaan BUMDes Kerjaya Krasa, menjadi lokasi yang representatif untuk mengkaji transformasi digital di wilayah pedesaan. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama bulan Februari hingga Mei 2025, dengan serangkaian kegiatan pengumpulan data lapangan, wawancara, observasi langsung, serta dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naturalistik, di mana peneliti berupaya memahami fenomena dalam konteks alaminya, tanpa melakukan intervensi atau manipulasi variabel. Peneliti terlibat langsung dalam lingkungan penelitian sebagai perangkat desa, yang sekaligus berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap

dinamika sosial serta peran BUMDes dalam transformasi digital di Desa Krocok (Yusanto, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan jaringan WiFi desa oleh BUMDes Kerjaya Krasa. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yakni; Kepala Desa Krocok Bapak Ratman, Sekretaris Desa Bapak Arief Wibowo, Ketua BUMDes Bapak Waryono, Bendahara BUMDes Bapak Mashut, Sekretaris BUMDes Saudari Alfiana, Kasi Kesejahteraan Desa Bapak Mutaqim selaku pelanggan rumahan layanan WiFi, serta Bapak Widodo pemilik warung yang menjual voucher WiFi BUMDes.

Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk menggali pengalaman dan makna subjektif dari para informan secara mendalam, sebagaimana disarankan (Sugiyono, 2020), yang menekankan bahwa wawancara merupakan instrumen penting dalam penelitian kualitatif untuk memahami pandangan subjek secara komprehensif. Dokumentasi juga dilakukan guna melengkapi data dan memperkuat validitas temuan. Melalui pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas peran BUMDes dalam mendorong transformasi digital di tingkat desa.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum BUMDES Desa Krocok

Desa Krocok merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki karakteristik geografis pedesaan dengan perekonomian masyarakat yang sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan kegiatan ekonomi lokal berbasis usaha rumah tangga. Jumlah penduduk Desa Krocok mencapai 1.003 jiwa, yang terdiri dari 502 perempuan dan 499 laki-laki dalam 318 kepala keluarga. Komposisi ini menunjukkan distribusi gender yang seimbang dan tingkat kepadatan penduduk yang stabil, mendukung iklim sosial yang kondusif bagi pembangunan desa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2024).

Pada aspek pendidikan, sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Tercatat 413 orang berpendidikan terakhir SD, 328 orang lulusan SMP, dan 204 orang lulusan SMA. Namun, hanya 11 orang yang menempuh pendidikan tinggi, dan masih terdapat 45 orang yang belum tamat SD atau belum pernah bersekolah. Ketimpangan tingkat pendidikan ini menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi, yang menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan. Meski demikian, kondisi perekonomian masyarakat cukup dinamis dengan dukungan sektor pertanian, peternakan, usaha kuliner rumahan, produksi mebel, bengkel, dan aktivitas perdagangan kecil lainnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2024).

Salah satu lembaga yang memegang peran penting dalam penguatan ekonomi desa adalah BUMDes Kerjaya Krasa, yang resmi dibentuk pada tahun 2017. Tujuan utama pendiriannya adalah mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Unit usaha

yang dijalankan BUMDes meliputi budidaya kangkung dan bayam, penggemukan kambing, pengolahan jambu mete, distribusi air bersih melalui Pamsimas, dan layanan internet desa. Di antara unit-unit tersebut, layanan internet menjadi sektor paling menonjol, terutama sejak 2023, karena berperan sebagai motor transformasi digital desa.

Pada periode awal (2017-2023), infrastruktur jaringan hanya menggunakan antena pipa berdiameter 4 DIM yang menjangkau dua rumah dan enam titik warung penjual voucher WiFi. Partisipasi masyarakat rendah, kontribusi terhadap PADes nihil, dan tidak terdapat dokumentasi kelembagaan yang memadai. Ketiadaan proses serah terima dan dokumen resmi dari pengurus lama menjadi kendala besar bagi pengurus baru. Menurut Waryono, Direktur BUMDes periode 2023-2028, “Kami tidak menerima laporan keuangan maupun dokumen administratif, sehingga kesulitan mengevaluasi atau melanjutkan program yang sebelumnya dijalankan”.

Hal ini sejalan dengan pendapat Halim (2021), yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai alat komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih di Kuatkan lagi penelitian oleh Cahyaningwandini (2024) menekankan bahwa laporan keuangan berperan penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas. Tanpa laporan keuangan yang disusun dengan baik, proses evaluasi terhadap kelayakan kredit dan pengambilan keputusan lainnya menjadi terhambat. Masalah ini memperlihatkan lemahnya sistem pengarsipan dan transisi kelembagaan, yang sejalan dengan pendapat Suryo Wibowo & Sulistya Hapsari (2022), keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat bergantung pada tiga pilar utama, yaitu dokumentasi yang tertib, transparansi dalam pengelolaan, serta kesinambungan antarperiode kepemimpinan.

Dokumentasi yang baik menjadi fondasi bagi akuntabilitas organisasi, karena mencatat seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan usaha desa. Tanpa dokumentasi yang memadai, maka setiap pergantian pengurus berisiko mengulang dari awal karena tidak memiliki pijakan administratif dan historis yang jelas. Selain itu, transparansi juga menjadi syarat mutlak dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Ketika informasi keuangan dan kegiatan dibuka secara terbuka, masyarakat akan merasa dilibatkan dan memiliki, sehingga memperkuat partisipasi publik. Adapun kesinambungan antarperiode menjadi elemen penting agar program yang telah dijalankan tidak berhenti akibat pergantian struktur kepengurusan. Dengan adanya kesinambungan ini, proses pembangunan ekonomi desa dapat berlangsung secara berkelanjutan dan progresif. Teori ini menggarisbawahi bahwa kelemahan dalam salah satu dari ketiga aspek tersebut dapat menghambat efektivitas dan daya tahan BUMDes dalam jangka panjang.

Desa Krocok, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, merupakan salah satu desa yang menunjukkan dinamika sosial ekonomi yang berkembang seiring dengan berbagai inisiatif pembangunan berbasis potensi lokal. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa perekonomian warga bersumber dari berbagai

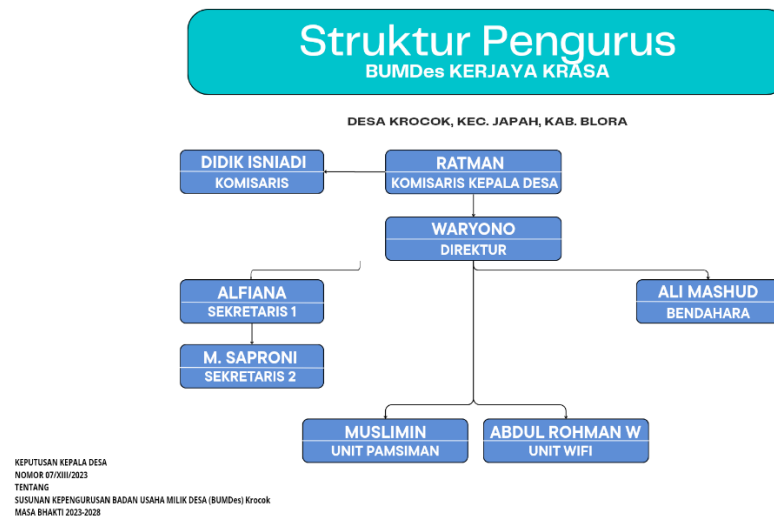
sektor, seperti industri kerajinan, pertanian, peternakan, dan jasa. Kegiatan usaha lokal seperti pembuatan mebel, perbengkelan, serta perdagangan turut menopang perekonomian desa secara berkelanjutan. Keragaman ini mencerminkan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya lokal secara produktif. Dari sisi kelembagaan, Desa Krocok memiliki struktur organisasi pemerintahan yang lengkap dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Salah satu lembaga strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerjaya Krasa, yang tidak hanya mengelola layanan WiFi desa, tetapi juga berkontribusi dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ratman selaku Kepala Desa sekaligus Komisaris, diperoleh informasi bahwa BUMDes Kerjaya Krasa resmi didirikan pada tahun 2017. Pendirian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan strategis desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sejak awal operasionalnya, BUMDes ini telah menjalankan berbagai unit usaha yang berbasis pada potensi unggulan wilayah setempat. Beberapa sektor yang dikembangkan meliputi budidaya kangkung dan bayam, pengolahan jambu mete, penggemukan ternak kambing, serta pengelolaan distribusi air bersih melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Aset utama yang dimiliki BUMDes Kerjaya Krasa meliputi peralatan jaringan internet, perangkat komputer, serta sumber daya manusia yang bertugas dalam pengelolaan usaha. BUMDes Kerjaya Krasa juga memperoleh modal awal dari dana desa sebesar Rp. 60 juta yang di geleontorkan 2 kali pada tahun 2017 dan 2023 (Bapak Ratman Wawancara pribadi, 21 April 2025).

Pemerintah Desa Krocok melakukan reorganisasi kepengurusan BUMDes Kerjaya Krasa pada tahun 2023. Struktur baru ditetapkan untuk periode 2023-2028. Susunan organisasi meliputi Ketua Bapak Waryono, Sekretaris Alfiana, Bendahara Ali Mashud, serta beberapa anggota yang bertanggung jawab atas unit usaha seperti pertanian, peternakan, pengolahan hasil tani, distribusi air bersih, dan layanan internet desa. Penyusunan struktur dilakukan secara partisipatif. Organisasi diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan desa dan penguatan ekonomi lokal. Reorganisasi mencerminkan perbaikan tata kelola kelembagaan. Struktur yang baru menjadi fondasi untuk memastikan keberlanjutan BUMDes. Tata kelola yang efektif menuntut kesinambungan administrasi dan kepemimpinan antar periode. Struktur yang adaptif menjadi kunci responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.

Pendapat Winarni (2020) menegaskan pentingnya kesinambungan dokumentasi dan struktur dalam menjaga keberlanjutan kelembagaan desa. Dikuatkan peneliti Ferdi dkk (2024) menyatakan bahwa kelembagaan yang responsif dibentuk oleh struktur adaptif, bukan sekadar formalitas hukum. Alfianto & Suryandari (2015) mengingatkan bahwa akuntabilitas dan profesionalisme dimulai dari penataan struktur yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Struktur baru BUMDes Kerjaya Krasa mencerminkan prinsip-prinsip

tersebut. Model ini berpotensi menjadi rujukan dalam penguatan kelembagaan ekonomi desa secara partisipatif dan berkelanjutan.



Gambar 1
Struktur Pengurus Bumdes

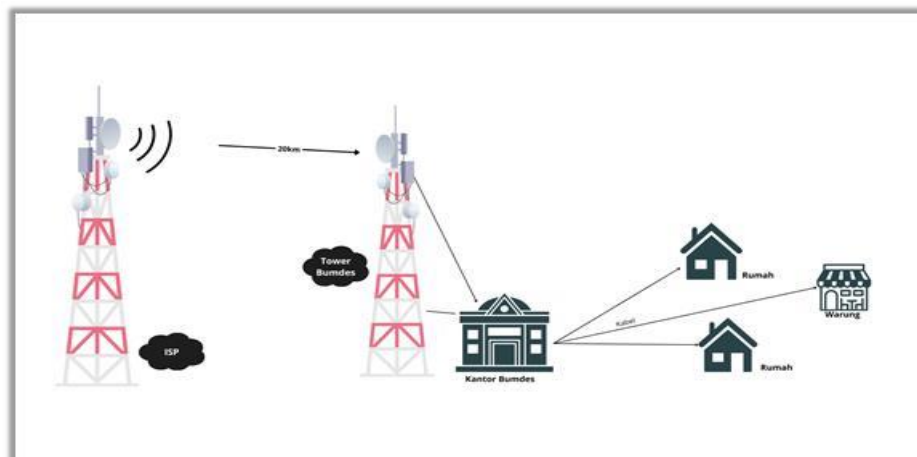
Melalui struktur organisasi yang tertata serta arah usaha yang berkembang dari pengelolaan potensi lokal hingga digitalisasi layanan, BUMDes Kerjaya Krasa berperan sebagai aktor strategis dalam mendorong transformasi ekonomi dan sosial di Desa Krocok secara berkelanjutan. Keberadaan BUMDes ini tidak hanya sekadar menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen kelembagaan desa dalam menghadapi tantangan pembangunan era digital. Sejalan dengan pendapat Karyana (2023), BUMDes dapat menjadi penggerak pembangunan lokal apabila didukung oleh tata kelola yang baik, inovasi berbasis potensi desa, serta orientasi pada pemberdayaan masyarakat. Hal ini tercermin dari upaya BUMDes Kerjaya Krasa yang tidak hanya mengelola layanan internet desa dan voucher, tetapi juga membangun sinergi dengan pemerintah desa dalam mendorong pelayanan publik berbasis digital. Peran BUMDes Kerjaya Krasa desa Krocok dalam Pengadaan Jaringan Internet Desa

BUMDes Kerjaya Krasa di Desa Krocok memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah desa, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Desa Krocok, Bapak Ratman, yang menyatakan bahwa, “BUMDes sangat membantu kami dalam menggerakkan roda ekonomi desa, terutama sejak adanya unit usaha layanan internet yang kini berkembang pesat” (Wawancara pribadi, 21 April 2025). Awalnya, unit usaha WiFi tidak termasuk dalam prioritas utama pengembangan BUMDes. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses digital, layanan ini justru berkembang menjadi salah satu produk unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD).

Perkembangan tersebut sejalan dengan pandangan Sunaryono (2024), yang menyatakan bahwa keberlanjutan dan keberhasilan BUMDes sangat ditentukan

oleh kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan lokal serta inovasi berbasis potensi desa. Lebih lanjut, Eko menekankan pentingnya integrasi antara kelembagaan desa dan pengelolaan usaha agar BUMDes tidak hanya menjadi entitas ekonomi, tetapi juga instrumen pembangunan sosial dan tata kelola yang demokratis. Dalam konteks ini, BUMDes Kerjaya Krasa mampu menunjukkan peran gandanya sebagai pelaku ekonomi desa dan penggerak transformasi digital yang relevan dengan dinamika masyarakat. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan kapasitas kelembagaan lokal dalam menjawab tantangan pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Desa Krocok, Kecamatan Japah, tengah melakukan langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan sinyal telekomunikasi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam akses informasi dan layanan digital. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerjaya Krasa, dibangunlah sebuah antena tower setinggi 40 meter yang dirancang khusus sebagai penerima sinyal internet dari pusat jaringan yang berjarak hingga 30 kilometer. Tower ini menggunakan sistem transmisi nirkabel berbasis teknologi *point to point* dan *point to multipoint*, yang memungkinkan distribusi sinyal secara efisien ke berbagai titik stasiun wifi di lingkungan desa.



Gambar 2
Rancangan Struktur Jaringan Akses Internet Desa

Gambar skematik tersebut menggambarkan alur distribusi sinyal internet dari tower ISP ke tower BUMDes, dilanjutkan ke kantor BUMDes Kerjaya Krasa sebagai pusat kontrol, dan diteruskan ke rumah warga serta warung melalui sistem point-to-multipoint. Model distribusi ini memungkinkan layanan menjangkau area yang lebih luas dengan biaya efisien, sekaligus menunjukkan kesiapan teknis layanan internet desa yang dikelola secara mandiri dan profesional.

Sinyal internet tersebut berasal dari jaringan milik pihak rekanan provider Telkonsel (pihak ketiga yaitu CV M-Crew Management) yang telah memiliki akses pusat internet stabil. Oleh karena itu, BUMDes Kerjaya Krasa tidak perlu membangun menara pemancar baru, melainkan cukup menyiapkan satu tower

utama sebagai penerima sinyal. Selanjutnya, sinyal yang diterima akan disalurkan ke pelanggan melalui jaringan kabel yang ditanam atau ditarik ke rumah-rumah warga maupun titik layanan umum. Inisiatif ini membuka akses informasi yang luas, mendukung aktivitas pendidikan, usaha mikro, dan komunikasi masyarakat secara daring.

Dukungan permodalan dari pemerintah desa melalui Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2023 sebesar Rp60.000.000,00. (Bapak Ratman, wawancara tanggal 21 April 2025) BUMDes Kerjaya Krasa membangun infrastruktur jaringan yang lebih kuat dan luas. Dampak pembangunan ini tercermin dalam kemudahan akses internet bagi warga. Literasi digital masyarakat meningkat. Kesadaran warga terhadap pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari mulai tumbuh secara signifikan.

Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan digital di kawasan perdesaan bukan sekadar wacana, melainkan suatu kenyataan yang dapat diwujudkan secara konkret. Implementasi layanan WiFi desa yang dikelola oleh BUMDes di Desa Krocok menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital dapat terjadi di tingkat desa. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Akses internet yang lebih merata telah membuka peluang baru dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal yang berkelanjutan.



Gambar 3
Pengadaan wifi menggunakan tower

Selain menyediakan infrastruktur jaringan, BUMDes Kerjaya Krasa juga aktif mengedukasi warga melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Program ini mencakup pengenalan teknologi dasar, pemanfaatan internet untuk pelajar dan pelaku usaha kecil, serta pendampingan dalam penggunaan platform digital untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Di sisi lain, layanan

internet desa juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui sistem berlangganan yang diberlakukan kepada pengguna layanan.

Berdasarkan hasil identifikasi, peran BUMDes Kerjaya Krasa dalam pengadaan jaringan internet dan digitalisasi desa dapat dikelompokkan ke dalam lima poin temuan utama sebagai berikut:

1. Penyedia Layanan Internet Lokal

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Waryono pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, diperoleh gambaran bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerjaya Krasa di Desa Krocok memegang peran strategis dalam inisiatif penyediaan layanan internet bagi masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai operator jaringan WiFi desa sekaligus bertindak sebagai reseller layanan internet yang menjangkau rumah-rumah warga, termasuk di wilayah yang sebelumnya belum memiliki akses jaringan. Saat ini BUMDes Kerjaya Krasa Hingga Mei 2025, hingga bulan Mei 2025, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna layanan, dengan tercatat sebanyak 44 rumah tangga sebagai pelanggan tetap jaringan internet desa. Selain itu, titik distribusi voucher WiFi yang awalnya terbatas kini telah berkembang menjadi enam warung mitra penjualan yang tersebar di berbagai dusun. Layanan internet yang ditawarkan oleh BUMDes mencakup berbagai paket dengan pilihan kecepatan dan harga yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat, yaitu: Paket Hemat (10 Mbps), Paket Keluarga dengan harga Rp150.000 per bulan (25 Mbps), serta Paket Combo seharga Rp500.000 per bulan untuk kecepatan hingga 50 Mbps. Sementara itu, layanan voucher (vocer) internet dijual seharga Rp2.000 per jam dan tersedia di warung-warung mitra yang turut diberdayakan secara ekonomi oleh BUMDes.

Temuan ini memperlihatkan bahwa BUMDes Kerjaya Krasa tidak hanya menghadirkan layanan digital berbasis kebutuhan komunitas, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi lokal yang terintegrasi dengan inovasi teknologi. Peran aktif BUMDes dalam penyediaan infrastruktur digital desa mencerminkan kapasitas kelembagaan lokal dalam menginisiasi model pembangunan berbasis komunitas yang adaptif terhadap era digital, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan berbasis teknologi informasi.

2. Pendukung E-Government dan Transparansi Desa

Hasil wawancara mendalam dengan Sekretaris Desa Krocok, Bapak Arief Wibowo, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, mengungkapkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerjaya Krasa dalam penyediaan layanan internet lokal tidak hanya berfokus pada aspek konektivitas digital, tetapi juga menjadi bagian integral dari penguatan tata kelola pemerintahan desa. Dalam keterangannya, Bapak Arief menjelaskan bahwa sejak tahun 2023, BUMDes bersama pemerintah desa telah menginisiasi pengembangan Sistem Informasi Desa berbasis daring. Sistem ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan e-Government di tingkat lokal dengan mempercepat proses pelayanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperluas akses informasi bagi warga.

Secara teknis, sistem informasi tersebut mencakup layanan administrasi kependudukan, pengajuan surat menyurat secara daring, hingga publikasi laporan anggaran dan realisasi program pembangunan desa. Implementasi sistem ini sepenuhnya memanfaatkan infrastruktur internet desa yang dikelola oleh BUMDes Kerjaya Krasa. Hal ini memungkinkan warga untuk mengakses layanan secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor desa, yang secara signifikan menurunkan beban administratif dan mempercepat waktu pelayanan.

Lebih lanjut, pemanfaatan platform digital ini juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Data anggaran, progres pembangunan, serta laporan kegiatan kini dapat diakses secara terbuka melalui Website resmi desa (<https://krocokdesa.blorakab.go.id/>), sehingga masyarakat dapat secara langsung memantau dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang berjalan. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat prinsip good governance, sebagaimana ditegaskan (Nugroho, 2018) dalam E-Government: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, bahwa implementasi teknologi digital dalam pemerintahan desa mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

3. Penggerak Ekonomi Digital Lokal

Ketersediaan akses internet yang lebih luas dan stabil di Desa Krocok telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengadopsi teknologi digital dalam kegiatan usahanya. Sebelum hadirnya layanan internet desa, sebagian besar pelaku usaha hanya mengandalkan sistem penjualan langsung secara tatap muka di pasar atau melalui jaringan pelanggan terbatas. Namun, sejak layanan internet diperluas oleh BUMDes Kerjaya Krasa, terjadi peningkatan penggunaan media digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk lokal.

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pelaku UMKM telah mulai memanfaatkan video pendek di media sosial sebagai media promosi. Salah satu contohnya adalah praktik pemasaran yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha lokal melalui platform TikTok dengan akun bernama *Qaisha Azalea*. Konten video yang diunggah pada tautan <https://vt.tiktok.com/ZShvDbMQE/> menunjukkan efektivitas media sosial dalam menjangkau konsumen di luar wilayah desa, membuktikan bahwa digitalisasi pemasaran berpotensi mendorong perluasan pasar bagi produk-produk lokal. Fenomena ini sebelumnya sangat jarang ditemukan di lingkungan pedesaan, tetapi kini menjadi praktik yang semakin umum seiring meningkatnya literasi digital masyarakat.

Transformasi digital di pedesaan menunjukkan pergeseran signifikan dalam pola usaha masyarakat dari sistem konvensional menuju ekosistem digital yang lebih inklusif dan berdaya saing. Apriani & Wahdiniawati (2024) menegaskan bahwa adopsi teknologi digital oleh pelaku UMKM desa tidak hanya meningkatkan efisiensi usaha, tetapi juga memperkuat posisi tawar produk lokal dalam menghadapi pasar modern. Senada dengan itu, Kusumawardhany dkk (2024) menyatakan bahwa pemasaran digital mampu mengurangi biaya

promosi sekaligus memperluas akses pasar, bahkan hingga tingkat nasional. Regif dkk (2023) juga menyoroti pentingnya literasi digital dan penggunaan platform berbasis komunitas sebagai pendorong pemberdayaan ekonomi desa. Dalam praktiknya, BUMDes Kerjaya Krasa di Desa Krocok telah memanfaatkan media sosial dan jaringan internet desa untuk mempromosikan produk lokal. Inisiatif ini menjadi fondasi pembentukan ekonomi digital desa yang mandiri dan berkelanjutan, berbasis pada potensi dan partisipasi masyarakat.

4. Penyedia Layanan Keuangan Digital

Beberapa layanan non-tunai seperti PPOB (*Payment Point Online Bank*), *e-wallet*, dan pembayaran berbasis QRIS mulai difasilitasi oleh BUMDes untuk kemudahan transaksi masyarakat. Observasi lapangan yang diperkuat melalui wawancara pribadi bersama Bapak Ali Mashud pada Selasa, 29 April 2025, mengungkapkan bahwa BUMDes Kerjaya Krasa Desa Krocok telah mengambil peran penting dalam mendukung ekosistem layanan keuangan digital di tingkat desa.



Gambar 4
Warung Warga Penyedia Layanan Pembayaran Non-Tunai

Pemanfaatan layanan keuangan non-tunai di tingkat pedesaan semakin menunjukkan dampak positif terhadap aksesibilitas dan efisiensi pelayanan publik. Dalam wawancara yang dilakukan 29 April 2025, Ali Mashud selaku Bendahara BUMDes Kerjaya Krasa sekaligus pemilik layanan *Payment Point Online Bank* (PPOB), mengungkapkan bahwa kehadiran berbagai platform keuangan digital seperti PPOB, dompet digital (*e-wallet*), serta sistem pembayaran berbasis QRIS telah memberikan kemudahan nyata bagi warga Desa Krocok. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya masyarakat harus bepergian ke kota hanya untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau membeli pulsa. Kini, berbagai transaksi tersebut dapat dilakukan langsung dari desa melalui mitra-mitra lokal, seperti toko Fahriasi Jaya, yang menjadi rekanan resmi BUMDes.

“Semua bisa dilakukan dari desa, lebih cepat dan hemat waktu,” ujar Ali Mashud (wawancara pribadi, 29 April 2025).

Menurutnya, sinergi antara pelaku usaha lokal dan BUMDes mempermudah warga dalam memenuhi kebutuhan harian, mulai dari pembayaran listrik, air, iuran BPJS, hingga pembelian kebutuhan pokok. Transformasi digital layanan keuangan di pedesaan mampu mempercepat inklusi keuangan nasional, mengoptimalkan layanan publik berbasis potensi lokal, serta menekan biaya transaksi melalui kolaborasi dengan pelaku usaha mikro, sebagaimana disampaikan oleh Salim dkk (2024).

Inisiatif ini bukan hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan digital di pedesaan, di mana masyarakat yang sebelumnya belum terbiasa dengan sistem pembayaran digital kini mulai beradaptasi. Digitalisasi keuangan di desa dapat memperluas akses layanan keuangan formal dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kolaborasi antara institusi lokal seperti BUMDes dan pelaku usaha mikro sangat penting dalam mempercepat inklusi digital di wilayah pedesaan. Maka, transformasi digital yang dilakukan BUMDes Kerjaya Krasa tidak hanya menjawab kebutuhan praktis warga, tetapi juga mendorong kemajuan ekonomi desa yang adaptif dan berkelanjutan.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerjaya Krasa dalam menggerakkan roda perekonomian lokal Desa Krocok tercermin secara nyata dari testimoni masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitasnya. Salah satu temuan empiris penting berasal dari wawancara dengan Bapak Widodo, pemilik warung yang menjalin kerja sama dengan BUMDes Kerjaya Krasa dalam distribusi voucher WiFi. Dalam wawancara yang dilakukan pada Minggu, 27 April 2025, Bapak Widodo menyampaikan bahwa kehadiran layanan internet desa melalui sistem penjualan voucher tidak hanya meningkatkan aktivitas warungnya, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarganya. Ia menuturkan bahwa sejak menjual voucher WiFi BUMDes, jumlah pelanggan warung bertambah, dan barang dagangan lebih cepat habis terjual.

Hasil wawancara Bapak Widodo pada 27 April 2025 menggambarkan bagaimana kebijakan digitalisasi desa yang diimplementasikan melalui BUMDes “Kerjaya Krasa” tidak hanya bersifat makro dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), tetapi juga memberikan efek ekonomi mikro yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil di desa. Warung-warung lokal menjadi simpul ekonomi digital yang memperluas akses masyarakat terhadap layanan internet sekaligus memperkuat ekonomi rumah tangga.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sutoro Eko, (2014) dalam bukunya *Desa Membangun Indonesia*, yang menyatakan bahwa BUMDes dapat menjadi aktor transformasi ekonomi lokal jika mampu mengelola potensi desa secara inklusif dan partisipatif. Menurutnya, ketika BUMDes melibatkan masyarakat secara langsung dalam praktik ekonomi digital, maka dampaknya akan lebih kuat terhadap redistribusi manfaat ekonomi di tingkat akar rumput. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan kolaboratif antara kelembagaan desa dan usaha warga mampu menciptakan sinergi produktif dalam pembangunan ekonomi desa berbasis digital, sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat terhadap akses layanan dan peningkatan penghasilan.

5. Pusat Inovasi Teknologi Desa

BUMDes menjadi pusat inovasi teknologi lokal yang mengembangkan solusi digital berbasis kebutuhan desa, BUMDes Kerjaya Krasa di Desa Krocok, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, tidak hanya berperan sebagai entitas ekonomi desa, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat inovasi teknologi desa yang mendorong transformasi digital secara menyeluruh. Melalui pengelolaan layanan internet desa yang menjangkau rumah-rumah warga, BUMDes ini berhasil menyediakan akses digital yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber, seperti Bapak Waryono (Wawancara pribadi, 21 April 2025) yang menyebut BUMDes berperan sebagai operator jaringan dan reseller layanan internet, serta Sekretaris Desa Arief Wibowo pada tanggal yang sama yang menegaskan bahwa sistem informasi desa berbasis daring telah mendorong pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan, menunjukkan bahwa infrastruktur digital telah dijadikan sebagai fondasi pelayanan dan penguatan tata kelola desa.

Lebih jauh, hasil wawancara dengan Bapak Ali Mashud, Bendahara BUMDes sekaligus mitra PPOB (Wawancara pribadi, 27 April 2025), mengungkapkan bahwa layanan keuangan digital seperti pembayaran berbasis *QRIS*, e-wallet, dan PPOB telah difasilitasi oleh BUMDes sebagai bentuk modernisasi transaksi masyarakat. Penjualan voucher WiFi juga menjadi bentuk inovasi digital berbasis komunitas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh pelaku ekonomi mikro, seperti Bapak Widodo (pemilik warung lokal) yang mengakui bahwa pendapatannya meningkat karena peningkatan aktivitas pelanggan akibat penjualan voucher (Wawancara pribadi, 27 April 2025).

Dengan berbagai inisiatif tersebut, BUMDes Kerjaya Krasa layak dikategorikan sebagai pusat inovasi teknologi desa yang tidak hanya memfasilitasi konektivitas digital, tetapi juga mengintegrasikan layanan publik, ekonomi, dan keuangan dalam satu sistem berbasis teknologi. Keberadaan BUMDes ini membuktikan bahwa desa mampu menjadi ruang tumbuhnya inovasi jika diberi akses, kepercayaan, dan dukungan kelembagaan yang kuat.

KENDALA DAN STRATEGI PENGADAAN JARINGAN INTERNET DESA

1. Keterbatasan Teknologi dan Jangkauan Sinyal

Permasalahan teknis dalam pengelolaan layanan internet desa menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam proses digitalisasi pedesaan. Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Bapak Mutaqim, salah satu pelanggan layanan internet desa di Desa Krocok, disampaikan bahwa ketidakstabilan koneksi sering terjadi terutama saat cuaca buruk. "Kalau kadang tidak konek, biasanya karena cuaca. Tapi begitu cuaca membaik, sinyal juga langsung kembali normal" (Wawancara pribadi, 27 April 2025). Keterangan ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam sistem jaringan yang digunakan oleh BUMDes, yakni jaringan point-to-point (PtP), yang secara teknis hanya efektif dalam radius sekitar 30-50 meter. Selain itu, sistem ini sangat rentan terhadap gangguan fisik seperti pohon rindang atau bangunan tinggi, yang

dapat menghalangi jalur transmisi sinyal. Beberapa wilayah, seperti Dusun Timur dan Krajan Barat, bahkan belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan yang ada saat ini.

Menanggapi persoalan tersebut, BUMDes Kerjaya Krasa telah menyusun strategi peningkatan infrastruktur dengan merencanakan pengadaan perangkat access point outdoor yang memiliki kapasitas jangkauan lebih luas dan tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem. Penambahan titik relay juga dipertimbangkan sebagai solusi untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang sulit diakses oleh sinyal utama. Langkah ini merupakan bagian dari adaptasi teknologi yang diperlukan agar pemerataan akses internet dapat diwujudkan di seluruh wilayah desa.

Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Suryo Wibowo & Sulistya Hapsari (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi desa tidak hanya ditentukan oleh tersedianya jaringan, tetapi juga oleh kemampuannya dalam menjangkau seluruh elemen masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, respons cepat BUMDes dalam menghadapi kendala teknis ini menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas digital dan keberlanjutan layanan, yang menjadi landasan penting bagi penguatan transformasi digital desa secara holistik.

2. Keterbatasan Infrastruktur dan Alat Penunjang

Permasalahan infrastruktur teknis menjadi salah satu tantangan krusial dalam pengembangan layanan internet desa yang dikelola oleh BUMDes. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Ali Mashud, Bendahara BUMDes Kerjaya Krasa, dalam wawancara pada tanggal 12 April 2025. Ia menyatakan bahwa, “Setiap kerusakan menjadi tanggung jawab BUMDes Kerjaya Krasa, bukan pelanggan. Tapi kami belum punya alat-alatnya, jadi masih panggil teknisi luar.” Pernyataan ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam kesiapan teknis BUMDes, khususnya dalam hal ketersediaan peralatan dasar seperti alat pendeteksi kabel putus dan penyambung jaringan. Ketergantungan pada teknisi dari luar desa tidak hanya memperlambat proses penanganan gangguan, tetapi juga menambah beban biaya operasional, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kepuasan pelanggan dan efisiensi layanan.

Kondisi tersebut menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan kapasitas teknis internal dalam menunjang keberlanjutan program digitalisasi desa. Dalam konteks ini, strategi yang tengah dirintis oleh BUMDes adalah melakukan pengadaan alat-alat teknis secara bertahap serta memberikan pelatihan teknis bagi pengurus agar mampu melakukan perbaikan secara mandiri. Langkah ini diharapkan dapat membangun kemandirian teknis desa dalam pengelolaan jaringan digital.

Sejalan dengan itu, Apriani & Wahdiniawati, (2024) menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital di tingkat lokal sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya teknologi dan kemampuan aktor lokal dalam mengelolanya secara mandiri. Ketika desa hanya menjadi pengguna tanpa penguatan kapasitas teknis, maka ketergantungan terhadap pihak eksternal akan menjadi hambatan dalam mewujudkan kedaulatan digital desa. Oleh

karena itu, intervensi dalam bentuk pelatihan, penyediaan alat, dan pengembangan SDM menjadi elemen kunci dalam mendukung efektivitas dan keberlanjutan inovasi digital di wilayah perdesaan.

3. Biaya Operasional Tinggi dan Ketergantungan Unit Usaha Lain

Permasalahan keberlanjutan operasional layanan internet desa menjadi tantangan krusial dalam pengelolaan teknologi digital berbasis komunitas. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BUMDes Kerjaya Krasa, Waryono, pada April 2025, terungkap bahwa layanan WiFi desa masih menghadapi ketidakstabilan keuangan. Ia menyatakan, “Selama ini kami berupaya subsidi silang dari unit usaha lain karena tidak ada subsidi tetap. Kadang kalau pelanggan berkurang, ya defisit.” Data ini menunjukkan bahwa biaya operasional bulanan berkisar antara Rp.500.000 hingga Rp.800.000, namun pendapatan dari pelanggan cenderung fluktuatif, bergantung pada jumlah pengguna dan penjualan voucher. Kondisi ini mendorong ketergantungan terhadap unit usaha lain milik BUMDes, seperti layanan air bersih (Pamsimas), untuk menutupi defisit yang terjadi.

Sebagai respon terhadap tantangan ini, BUMDes menerapkan strategi diversifikasi pendanaan. Strategi tersebut mencakup pengenaan biaya pemasangan awal sebesar Rp.120.000 bagi pelanggan baru serta menjalin kemitraan dengan penyedia layanan internet lokal guna mendapatkan tarif yang lebih bersaing. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan neraca pendapatan-operasional, tetapi juga mencerminkan fleksibilitas kelembagaan dalam menghadapi dinamika pasar desa.

Fenomena ini sejalan dengan pendapat Iswanto et al. (2024) dalam Manajemen Pembangunan Sosial, yang menyatakan bahwa keberlanjutan program berbasis komunitas, khususnya di desa, sangat dipengaruhi oleh kemampuan kelembagaan lokal dalam melakukan inovasi pembiayaan dan mengelola risiko fiskal secara adaptif. Strategi subsidi silang dan diversifikasi pendapatan yang diterapkan BUMDes Kerjaya Krasa menunjukkan bentuk nyata dari adaptasi tersebut. Meskipun menghadapi keterbatasan struktural, BUMDes Kerjaya Krasa mampu menjaga layanan tetap berjalan melalui pengelolaan yang responsif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa. Ke depan, pendekatan ini dapat dijadikan model awal dalam pengembangan ekosistem digital desa yang mandiri dan berkelanjutan.

4. Keterbatasan SDM dan Masalah Administrasi Internal

Tata kelola organisasi merupakan komponen krusial dalam keberlanjutan dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Kerjaya Krasa). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BUMDes Kerjaya Krasa, Alfiana (wawancara pribadi, 15 April 2025), terungkap bahwa BUMDes menghadapi tantangan serius dalam aspek administrasi akibat kurangnya dokumentasi dan pencatatan yang memadai dari pengurus sebelumnya. Alfiana menyatakan, “Kami menghadapi tantangan besar dalam menata ulang administrasi BUMDes karena kurangnya dokumentasi dan pencatatan yang memadai dari pengurus sebelumnya” Kondisi ini menjadi cerminan dari lemahnya tata kelola kelembagaan serta terbatasnya

sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar belakang teknis dan administratif.

Masalah tersebut berdampak pada kesulitan pengelolaan jaringan layanan internet desa serta keterbatasan dalam pelaporan keuangan secara sistematis. Sebagai respons terhadap persoalan ini, BUMDes Kerjaya Krasa mulai melakukan reformasi internal melalui dua pendekatan strategis: pertama, perbaikan sistem administrasi berbasis digital dengan menyusun pencatatan pelanggan dan pembukuan yang transparan dan terstandar; kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis jaringan dan manajemen keuangan desa. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan dalam membangun sistem yang tidak hanya reaktif, tetapi juga berkelanjutan.

Menurut Sutoro Eko (2014) dalam bukunya *Desa Membangun Indonesia*, penguatan kapasitas kelembagaan desa merupakan syarat utama agar BUMDes tidak hanya menjadi entitas ekonomi, tetapi juga pusat pembelajaran sosial dan tata kelola yang demokratis. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang diambil oleh BUMDes Kerjaya Krasa mencerminkan upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip good governance berbasis desa. Transformasi ini menjadi landasan penting bagi pengembangan layanan publik, ekonomi digital, dan sistem keuangan yang akuntabel di tingkat lokal.

Transformasi digital Desa Krocok, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora yang dikelola oleh BUMDes Kerjaya Krasa tidak hanya memberikan manfaat bagi pengguna secara individual, tetapi juga berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas fiskal desa melalui kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan yang diperoleh dari sistem langganan dan penjualan voucher WiFi menjadi sumber pemasukan baru yang sebelumnya belum tersedia dalam struktur keuangan desa. Selain itu, partisipasi warung-warung lokal dalam penjualan voucher turut memperkuat ekosistem ekonomi digital desa, terutama dengan mulai diadopsinya sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS dan dompet digital. Integrasi ini mencerminkan sinergi antara layanan BUMDes dan ekonomi lokal dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif. Penerimaan PADes dari sektor layanan internet menjadi indikator konkret bahwa digitalisasi desa tidak hanya berimplikasi pada aspek sosial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BUMDes Kerjaya Krasa Desa Krocok telah berhasil mengambil peran sentral dalam mendorong transformasi digital di tingkat desa melalui pengadaan jaringan internet berbasis WiFi. Pembangunan infrastruktur seperti tower penerima sinyal dan pendistribusian layanan ke rumah-rumah warga menjadikan BUMDes bukan hanya sebagai penyedia akses internet, melainkan juga sebagai penggerak utama dalam peningkatan literasi digital, penguatan ekonomi lokal berbasis teknologi, serta efisiensi dalam pelayanan publik desa. Terdapat lima peran utama yang dijalankan BUMDes dalam proses ini, yakni sebagai penyedia layanan internet

lokal, pendukung implementasi e-government, penggerak ekonomi digital, penyedia layanan keuangan digital, dan pusat inovasi teknologi desa.

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa layanan internet desa tidak sekadar menjawab kebutuhan akses informasi warga, tetapi telah berfungsi sebagai katalisator transformasi digital secara menyeluruh. Transformasi tersebut tercermin melalui peningkatan literasi digital masyarakat, kemudahan akses layanan keuangan digital seperti PPOB, e-wallet, dan QRIS, serta pemanfaatan sistem informasi desa berbasis online yang mendukung transparansi dan efisiensi birokrasi. Peran strategis BUMDes sebagai operator jaringan dan mitra layanan digital berhasil memperluas jangkauan digitalisasi hingga ke tingkat rumah tangga. Sumber pendapatan dari layanan internet ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga membuktikan bahwa inisiatif digitalisasi membawa dampak ekonomi konkret bagi kemandirian fiskal desa. Kekuatan utama dari pendekatan ini terletak pada adanya kolaborasi kelembagaan yang sinergis antara pemerintah desa dan BUMDes Kerjaya Krasa, serta kemampuan adaptif dalam mengadopsi teknologi secara bertahap.

Penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan di wilayah tertentu dan keberadaan kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya memahami teknologi digital. Pengembangan ke depan sebaiknya difokuskan pada perluasan jangkauan jaringan internet, pelaksanaan pelatihan literasi digital secara berkelanjutan, dan pengembangan ragam layanan berbasis teknologi lainnya. Keseluruhan hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan digital yang berbasis kelembagaan lokal seperti BUMDes Kerjaya Krasa merupakan strategi yang efektif dalam mempercepat transformasi desa menuju kemandirian ekonomi serta tata kelola pemerintahan yang modern dan partisipatif.

SARAN

Peneliti menyarankan agar pemerintah Desa Krocok memperkuat regulasi internal yang mengatur pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan BUMDes untuk menjamin kesinambungan kelembagaan antar periode. Penguatan kapasitas pengurus BUMDes melalui pelatihan akuntansi dan literasi digital perlu dioptimalkan guna mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pengembangan layanan internet desa sebaiknya dilanjutkan secara terstruktur sebagai bagian dari strategi transformasi digital yang berkelanjutan, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta kolaborasi lintas sektor yang relevan. Sistem dokumentasi berbasis digital juga perlu dibangun agar arsip kelembagaan tersimpan secara aman dan dapat diakses oleh generasi kepengurusan selanjutnya.

REFERENSI

Alfianto, S., & Suryandari, D. (2015). PENGARUH PROFESIONALISME, KOMITMEN ORGANISASI DAN STRUKTUR AUDIT TERHADAP KINERJA AUDITOR. *Accounting Analysis Journal*, 4. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:155566605>

- Apriani, A., & Wahdiniawati, S. A. (2024). Branding Produk UMKM Desa Cogreg Melalui Aplikasi Pemasaran Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Terapan*, 2(3), 94-101. <https://doi.org/10.38035/jpmpt.v2i3.594>
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43-55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. (2024). *Kecamatan Japah Dalam Angka 2024*. <https://blorakab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/a2cd004fd6a64b08628020f5/kecamatan-japah-dalam-angka-2024.html>
- Bhisma, I. K., Wasuka, P., & Sinarwati, N. K. (2025). *Analisis Kualitas Laporan Keuangan BUMDes (Studi pada BUMDes Artha Krama Mandiri Antiga Kelod).* 15(1), 47-57.
- Cahyaningwandini, S. N. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN & SANKSI PAJAK TERHADAP KETEPATAN PEMBAYARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PPH 21 DI KPP PRATAMA PARE. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(1), 59-66.
- Dewi, Luh Tu Sintia & Putra Yasa, I Nyoman. (2025). *Mengungkap Akuntabilitas Penerapan Digitalisasi Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes pada BUMDes Tunjung Mekar Desa Tunjung.* 15(1), 137-147.
- Ferdi, F., Paulina Ipa Kromen Betan, & Aminah Swarnawati. (2024). Iklim Komunikasi Organisasi Responsif Dalam Gaya Kepemimpinan Transaksional: Analisis Bibliometrik. *Jurnal Audiens*, 5(3), 463-476. <https://doi.org/10.18196/jas.v5i3.473>
- Fkun, E. (2019). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat. *Jurnal Poros Politik*, 1(1), 10-16. <https://doi.org/10.32938/jppol.v1i1.328>
- Giawa, Analius dan Rukoyah. (2021). Kontinuitas Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Dadapayu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Masyarakat dan Desa*, 1(2), 146-163. <https://doi.org/10.47431/jmd.v1i2.155>
- Ginting, A. H., & Nawawi, S. (2022). OPTIMALISASI BUMDes SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MENEKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN POHUWATO. *Jurnal Registratie*, 4(2), 64-76. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2817>
- Halim, I. (2021). *Penyusunan Laporan Keuangan.* 1, 4-8.
- Huda, M., Maulana, I., Uriva C, M., & Hidayati, L. (2024). Pemanfaatan literasi digital melalui pengelolaan website dan media sosial desa menuju desa go digital. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(1), 92-102. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i1.21030>
- Hasanah, lin Nida'ul. (2024). *STRATEGI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO.* pegawai pada Inspektorat kabupaten Lebak.

<https://inspektorat.lebakkab.go.id/berita/detail/strategi-membangun-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-melalui-pengembangan-manajemen-risiko>

- Irfan, & Anirwan. (2024). EXPLORASI IMPLEMENTASI DIGITALISASI DESA : STUDI LITERATUR EXPLORING THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE DIGITALIZATION : *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1), 1-8.
- Iswanto, D., Kurniawan Subagja, I., Hakim, A., Ermanto, C., & Ali, A. (2024). Peran Strategis BUM Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa: eval_uasi Kelembagaan dan Manajemen. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 787-797. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1397>
- Karyana, Y. (2023). Inovasi Pemberdayaan BUMDes Sebagai Simpul Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa. *Populika*, 11(1), 41-49. <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.731>
- Kusumawardhany, S. S., Shanti, Y. K., & Sudarmadi, S. (2024). THE ROLE OF DIGITAL MARKETING AS A MARKETING STRATEGY IN INCREASING REVENUE CV.LARRAZ MODERATION JAYA COSMETICS IN PAMULANG, SOUTH TANGERANG. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Komputer*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:271258292>
- Kusumawati, R. (2024). Digital Village Development Strategy To Improve Literacy, Public Service, and Community Self-Reliance. *Jurnal Governansi*, 10(1), 25-40.
- Peran, D. A. N., & Desa, P. (2025). OPTIMALISASI BUMDES DI INDONESIA MELALUI STRATEGI DIGITALISASI , PENGUATAN MODAL SOSIAL , TATA KELOLA. 5(1), 34-45.
- Regif, S. Y., Seran, M. S., Naif, I. Y., Pattipeilohy, A., & Saputri, L. (2023). Literasi Digital Ekonomi Hijau Terhadap Pemberdayaan UMKM Desa di Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1), 49-69. <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.6922>
- Ridwansyah, M., Hastuti, D., Heriberta, H., Syaparuddin, S., & Emilia, E. (2021). Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 39-48. <https://doi.org/10.53867/jpm.v1i2.30>
- Sabiludin, M., Anna, M., & Desipradani, Gi. (2023). *Strategi Bumdes Sidomapan Untuk Meningkatkan*. XX(2).
- Salim, D. F., Kristanti, F. T., & Isyнуwardhana, D. (2024). Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Desa Digital bagi Masyarakat Desa Pulosari. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:273816937>
- Saputra, R. (2021). *PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS KEMAMPUAN LOKAL (Studi Pada Desa Lubuk Bangkar kecamatan Batang Asai) PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI*.

- Sholahudin, U., Wahyudi, M. H., & Hariri, A. (2017). Pemerintah Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran Kabupaten Lamongan). *Cakrawala*, 11(2), 145-155. <https://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/15>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sunaryono. (2024). Analisis Pendapatan Lokal, Peluang Kerja, dan Diversifikasi Produk sebagai Pilar Keberlanjutan BUMDes. *Jurnal Ekonomi STIEP*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275473754>
- Suryo Wibowo, M. I., & Sulistya Hapsari, A. N. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 52-71. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>
- Sutoro Eko. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*.
- Tenda, C. A., Mangindaan, J. V., & Punuindoong, A. Y. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Desa Tounalet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Christy. *Productivity*, 3(2), 2013-2015.
- Wijaya, T. (2020). Penerapan Perpetual Inventory System dalam Perhitungan Laba Rugi Kotor Perusahaan Dagang. *Creative Information Technology Journal*, 5(4), 303. <https://doi.org/10.24076/citec.2018v5i4.223>
- Winarni, E. D. (2020). Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Desa: Studi Kasus Di Desa Nagawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 2(1), 1-19. <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v2i1.247>
- YUNIARDIKA, D. F. (2022). PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PADA IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Pada BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang). 33(1), 1-12.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>